

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Keberadaan Kadipaten Berbek sebagai pusat pemerintahan sudah dikenal pada tahun 1745 dengan Raden Tumenggung Sosrokoesoemo I atau yang lebih dikenal dengan nama Kanjeng Djimat diangkat sebagai Bupati. Hal ini terjadi karena wilayah Berbek telah masuk ke dalam daerah *Mancanegara wetan* dan tunduk pada Kerajaan Mataram. Perubahan nama dari Kadipaten menjadi *Afdeeling* terjadi setelah adanya Perjanjian Sepreh yang dilakukan di Ngawi pada tahun 1830, wilayah Berbek masuk menjadi bagian Karesidenan Kediri dan tunduk dibawah pengawasan pemerintah kolonial Belanda.

Pada rentang waktu tahun 1830-1878, sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Berbek tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini terjadi karena kondisi topografi wilayah Berbek yang dikelilingi oleh pegunungan yang terbentang dari utara maupun selatan, sehingga dalam pengembangan tata kota dan pemerintahannya dinilai berjalan lambat.

Pasca perjanjian Sepreh tahun 1830, pemerintah kolonial Belanda membuat kebijakan baru yaitu dengan melakukan penataan dan pengaturan wilayah Mancanegara Wetan yang dikuasai oleh Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Dampak yang terjadi adalah perubahan wilayah di Kaesidenan Kediri termasuk Berbek. Perkembangan selanjutnya, tepatnya

